

kantong suara" karena memiliki jumlah massa yang besar. Mereka memberikan janji-janji pembangunan dan pendirian rumah ibadah dan menyalurkan dana segar ke komunitas-komunitas beragama untuk menaikkan ekstabilitas suara menjadi rutinitas penting menjelang Pemilu.

Beragama dipraktikan secara *do ut des* (aku memberi supaya engkau balik memberikan sesuatu), belum lagi korupsi yang pernah terjadi di Kementrian Agama merupakan bukti perilaku beragama yang transaksional dan legalistis di Indonesia.

Perilaku beragama yang transaksional dan legalistis merupakan salah satu alasan mengapa pewujudan Negara Pancasila mengalami hambatan besar, nilai-nilai agama yang luhur dan mulia tidak mengalami internalisasi, tak terkecuali kekeristenan di Indonesia. Kekeristenan di Indonesia juga memiliki tanggungjawab terhadap sikap transaksional dan egalistis beragama di Indonesia yang menjadi salah satu hambatan terwujudnya Negara Pancasila.

Cara dan perilaku beragama tersebut, dalam kekeristenan di Indonesia juga menjadi kekuatiran Notohamidjojo. Perilaku transaksional dan legalistis menjadi hambatan bagi kekeristenan dalam mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam panggung bernegara, ketika nilai-nilai tersebut tidak diinternalisasikan dan menjadi sikap, pandangan serta perilaku politik kekeristenan. Notohamidjojo mengatakan:

"...gereja-gereja setempat sebagai jemaat-jemaat atau persekutuan-persekutuan orang kristen di mana-mana mengalami perpecahan, perebutan kekuasaan atau pengaruh. Demikian pula dalam pusat-pusat pimpinan gereja, dalam sinode-sinode atau deputat-deputat. Perpecahan-perpecahan dalam gereja-gereja ini kami anggap serius dan mengerikan..."²⁷.

Kekuatiran dan kritik Notohamidjojo tidak terlepas dari dinamika politik pada saat itu. Negara Pancasila yang diharapkan belum juga terwujud, dan itu bukan tanpa alasan. Notohamidjojo melihat lambatnya pewujudan Negara Pancasila karena krisis kepemimpinan di setiap lini negara, baik itu pemerintahan pusat maupun daerah. Kursi kepemimpinan yang banyak didominasi oleh kader-kader partai politik belum sadar akan gagasan dan tujuan negara ini. Kepentingan-kepentingan kelompok, perebutan kekuasaan dan konflik-konflik politik menjadi warna politik paling dominan pada saat itu sehingga gagasan Negara Pancasila lambat laun memudar²⁸.

Tampak bahwa Notohamidjojo menganggap kekeristenan (gereja) ikut bertanggungjawab terhadap terhambatnya pewujudan Negara

Pancasila dan anggapan tersebut masih terjadi sampai sekarang. Sikap transaksional dan legalistis gereja yang terlihat dari perpecahan-perpecahan, perebutan kekuasaan dan pengaruh diantara jemaat dan pemimpin gereja menunjukkan gereja belum memahami panggilannya. Gereja sebagai warga Kerajaan Allah memiliki panggilan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah ditengah krisis kepemimpinan dan politik Indonesia. dalam perannya sebagai nabi dan mitra negara, Gereja selayaknya menunjukkan sikap politik yang jelas dan tegas teradap realita yang kontradiktif dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Gereja dapat menjadi pusat pengkaderan yang menyumbang pemimpin-pemimpin yang sikap dan prilaku politiknya mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah, sehingga Negara pancasila dapat terwujud sepenuhnya. Notohamidjojo Mengatakan:

"Apabila kita ingin menyumbang secara konkrit dalam pembangunan masyarakat, negara dan gereja, kita harus menyumbangkan gagasan tentang kepemimpinan dan pemimpin yang sadar akan panggilannya dan yang bertanggungjawab, serta menyumbangkan gagasan-gagasan tentang kepemimpinan yang diperlukan di Indonesia yang mencari integrasi dan jalan menuju cita-citanya. Kepemimpinan dan pemimpin diperlukan, lebih-lebih bagi gereja, yang seharusnya pusat integrasi (bukan perpecahan) dan pembaharuan (bukan konservatisme dan kekolotan) bagi masyarakat dan negara".²⁹

Notohamidjojo melihat dalam hubungan dengan tugas dan panggilan gereja, gereja tidak dapat bersembunyi dibalik keminoritasan atau terus menerus hidup di dalam dualisme sikap dalam memandang dunia. Tugas dan panggilan gereja dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah berlaku di semua bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Di dalam bidang politik gereja harus bersaksi dan mengikuti Yesus secara politis, terlebih lagi dalam konteks sekarang di mana Negara Pancasila seharusnya dapat terwujud.

Jika hal tersebut terus terjadi, gereja belum dapat berperan sebagai nabi yang memberi kesaksian di ranah publik dan menyumbang pemimpin-pemimpin yang sadar akan panggilannya dalam mewujudkan Negara Pancasila ketika Gereja belum memilki sikap politik yang jelas. Sikap apolitis gereja dan prilaku transaksional dan legalistis dalam beragama akan menjadi hambatan gereja menyumbang pemimpin-pemimpin dalam rangka mewujudkan Negara Pancasila sebagai panggilannya dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di Indonesia. Gereja dalam bidang politik harus menunjukkan sikap politik

Kerajaan Allah bukan sikap politik yang berorientasi pada kekuasaan, uang dan kepentingan kolektif yang eksklusif. Sehingga, gereja yang sudah memiliki sikap politik yang jelas akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sadar akan panggilannya karena nilai-nilai tersebut mengalami internalisasi dan akhirnya menjadi pandangan, sikap dan perilaku-perilaku dalam kepemimpinan kader-kader kekeristenan di Indonesia.

Sedapatnya gereja memahami dirinya sebagai bagian yang integral dengan Negara ini dan pada satu sisi merupakan warga Kerajaan Allah yang tugas dan panggilan mengupayakan *kerugma* (memproklamasikan Kerajaan Allah) yang dilandaskan atas *agape* (kasih yang mengorbankan diri untuk sesama), *a-letheia* (kebenaran yang sebenar-benarnya) dan *dikajosune* (keadilan yang dijiwai). Gereja sedapatnya menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai Sebagai *weltanchauung*, dan diinternalisasikan sebagai nilai fundamental yang mendasari dan mengarahkan seluruh kehidupan, sikap dan perilaku gereja, tidak terkecuali di bidang politik. Dengan begitu gereja dapat berperan sebagai nabi, mitra dan penyumbang gagasan-gagasan pembaharuan serta kader-kader pemimpin bangsa yang mengerti bahwa panggilannya sebagai seorang kristen sejalan dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin publik maupun politik, yaitu mewujudkan Negara Pancasila.

Ditengah-tengah kepemimpinan bangsa yang menunjukkan titik nadir terendahnya, masih jauhnya kenyataan Negara Pancasila terwujud dan kebingungan kekeristenan menyikapinya, Pemikiran Teologi Politik Notohamidjojo menunjukkan solusi yang dapat dipertimbangkan secara serius. Notohamidjojo telah menunjukkan adanya kesamaan nilai-nilai yang terkandung diantara Kerajaan Allah dan Pancasila. Kendati ada persamaan nilai diantara Kerajaan Allah dan Pancasila, bukan berarti Notohamidjojo berusaha mengkristenkan Pancasila dan sebaliknya.

Secara positif, pemikiran Notohamidjojo dapat menjadi setandar nilai bagaimana gereja bersikap di dalam dunia politik dan memberi bentuk nyata terhadap tugas dan panggilannya dalam menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di Indonesia. Bentuk nyata tersebut ialah ikut berperan aktif dalam mewujudkan Negara Pancasila. Dengan demikian, gereja dapat terhindar sebagai kendaraan politik segelintir orang yang ingin mendapatkan kekuasaan bagi dirinya, karena gereja sudah memiliki setandar. Disamping itu, seperti Notohamidjojo katakan, gereja dapat menyumbang pemimpin-pemimpin dan gagasan-gagasannya untuk masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Tanpa mengenyampingkan adanya perbedaan antara masa orba dan reformasi, kita tidak dapat menutup mata terhadap banyaknya pejabat publik dan kader partai politik yang perilakunya tidak berbeda jauh dengan orba. Perilaku politik yang berorientasi pada kekuasaan, uang dan kepentingan seperti itu merupakan kendala terbesar bangsa ini dalam mewujudkan Negara pancasila. Survei yang dilakukan oleh *Transparancy International Indonesia* (TTI) terhadap 1.000 responden se Indonesia, menunjukkan 36% dari responden memberikan uang *pelicin* untuk mendapat kemudahan layanan publik, seperti: kepolisian, peradilan, perizinan, medis, pendidikan, pajak, pertanahan dan layanan listrik/air/telepon³⁰. pengesahan UUD Pilkada yang mencoba mencabut hak politik rakyat dalam memilih kepala daerah. Belum lagi 3000 anggota legislatif di Indonesia terjerat hukum yang sebagian besar kasus korupsi dan sebanyak 318 Kepala Daerah dari 524 orang Kepala Daerah terjerat KKN, yang juga menjerat para pejabat di tingkat pusat dan daerah. Merujuk dari fenomena tersebut, Gereja tidak dapat menyangkal bahwa dari sekian banyak pejabat publik dan kader partai yang terjerat kasus korupsi, penyelewengan wewenang dan perilaku politiknya tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terdapat anggota legislatif, pejabat publik dan kadr partai yang juga warga gereja.

Maka, melihat kenyataan seperti itu, pemikiran-pemikiran teologi politik Notohamidjojo sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh kekeristenan di Indonesia jika ingin ikut berperan aktif mewujudkan Negara Pancasila. Melalui pemikiran-pemikiran teologi politik Notohamidjojo, kita diingatkan kembali kepada tugas dan panggilan kita sebagai gereja di dunia dan secara khusus di Indonesia, yaitu menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Kerajaan Allah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai asas moral politik dan dasar tujuan bangsa ini. Jadi, dalam menghadirkan tanda-tanda tersebut, gereja tidak dapat "menganaktirikan" politik. Kesamaan nilai-nilai yang terkandung antara Kerajaan Allah dan Pancasila memungkinkan gereja-gereja di Indonesia mengambil sikap politik yang jelas, yaitu sikap politik Kerajaan Allah.

Dengan begitu, Gereja dapat memenuhi tugas dan panggilannya menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, melalui ikut berperan aktif dalam mewujudkan Negara Pancasila. Gereja juga dapat terhindar sebagai kendaraan politik seglintir orang untuk mendapat kekuasaan bagi dirinya karena memiliki sikap politik yang jelas. Di samping itu, Gereja dapat

menyumbang pemimpin-pemimpin yang tidak berpolitik "dua muka", melainkan pemimpin-pemimpin yang menyadari identitasnya. Sebagai orang Kristen Indonesia, memberi ia tanggungjawab dalam mewujudkan Negara Pancasila yang nilai dan tujuannya sejalan dengan Kerajaan Allah.

Daftar Pustaka

- Integrito. *Uang Pelicin: Kecil Jumlahnya Besar dampaknya*. Jakarta: KPK. 2013.
- Jon Lee, Hak, *Covenant and Communication: A Christian Moral Conversation With Jurgen Habermas*. Lanham, Maryland: University Press of America, 2006.
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK. 1975.
- Notohamidjojo, O. *Demokrasi Pantjasila*. di bawakan di dalam Seminar Hukum II di Semarang Pada tanggal 30 Desember 1968.
- Notohamidjojo, O. *Iman Kristen dan Politik*. Jakarta: BPK, 1951.
- Notohamidjojo, O. *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*. Salatiga : Satya wacana Press, 2011.
- Notohamidjojo, O. *Kreativitas Yang Bertanggungjawab*. Salatiga: Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial UKSW, 1973.
- Notohamidjojo, O. *Tanggungjawab Gereja dan Orang Kristen di Bidang Politik*. Jakarta: BPK, 1967.
- Prof. Dr. Phil. H. M. Nur kholis Setiawan dan Pdt. Dr. Djaka Soetapa. *Meniti Kalam Kerukunan*. Jakarta: BPK, 2010.
- Song, Choan Seng. *Yesus dan Pemerintahan Allah*. Jakarta: BPK GM, 2010.
- W. Hall, David. *Calvin di Ranah Publik : Demokrasi Liberal, Hak Asasi dan Kebebasan sipil*. Surabaya: Momentum, 2009.
- Wibowo, S etyo. *Khermatokrasi: Berdaulatnya Uang*. BASIS. No. 5-6, Tahun ke-63. 2014.
- <http://hukum.kompasiana.com/2014/09/25/pencabutan-hak-politik-upaya-penjeraan-sistemik-kepada-para-koruptor-pejabat-publik-681010.html> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2014).

Endnote

1. <http://hukum.kompasiana.com/2014/09/25/pencabutan-hak-politik-upaya-penjeraan-sistemik-kepada-para-koruptor-pejabat-publik-681010.html> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2014)
2. Setyo Wibowo, *Khermatokrasi: Berdaulatnya Uang*. BASIS, No. 5-6, Tahun ke-63, (2014), 14-15.
3. O. Notohamidjojo, *Iman Kristen dan Politik*, (Jakarta: BPK, 1951), 10.
4. Notohamidjojo, 11.

5. O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga: Satya Wacana Press, 2011), 126. Disampaikan pada Dies Natalis X UKSW dengan judul Memanusiakan Manusia Dalam Orde Baru dan dikutip dari sub bagian Penafsiran Pancasila yang Theo-anthropocentis pada tahun 1966.
6. O. Notohamidjojo, *Tanggungjawab Gerdja dan Orang Kristen di Bidang Politik*, (Jakarta: BPK, 1967), 43-44.
7. O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 352. Disampaikan dalam konsultasi studi DGI, 1415 oktober 1969, salatiga, Analisa Hubungan Kita Dengan orang orang Islam dalam Rangka pancasila yang sedang Membangun.
8. O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 661. Kepribadian Nasional.
9. O. Notohamidjojo, *Demokrasi Pantjasila*, di bawakan di dalam Seminar Hukum II di Semarang Pada tanggal 30 Desember 1968, 28. Di kutip dari buku Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila, karangan Notonagoro, 1967, 22-23.
10. Notohamidjojo, 52-53.
11. Prof. Dr. Phil. H. M. Nur kholis Setiawan dan Pdt. Dr. Djaka Soetapa. *Meniti Kalam Kerukunan*. Jakarta. BPK, 2010, 453.
12. Choan-Seng Song, *Yesus dan Pemerintahan Allah*, (Jakarta: BPK GM, 2010).
13. O. Notohamidjojo, *Tanggungjawab Gereja dan Orang Kristen di Bidang Politik*, (Jakarta: BPK, 1967), 12-22.
14. O. Notohamidjojo, *Iman Kristen dan Politik*, (Jakarta: BPK, 1951), 16-17.
15. O. Notohamidjojo, 16-17.
16. David W. Hall, *Calvin di Ranah Publik : Demokrasi Liberal, Hak Asasi dan Kebebasan sipil*. (Surabaya: Momentum, 2009), 358.
17. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 430. Dikutip dari Warta gereja, Tahun V, No. 1-5, Januari-Mei, salatiga, 1970.
18. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 357. Dipersiapkan sebagai dalil-dalil untuk Seminar Mahasiswa Theologia se Indonesia di Yogya (18-01-1969), namun karena kesalpahaman tidak jadi disampaikan.
19. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 78. Disampaikan oleh Notohamidjojo pada pembukaan kuliah, senin 7 januari 1963.
20. O. Notohamidjojo, *Kreativitas Yang Bertanggungjawab*, (Salatiga: Pusat Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial UKSW, 1973), 93-94.
21. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 106. Disampaikan pada pembukaan tahun akademis UKSW 1965-1966. 13 september 1965.
22. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 85. Disampaikan pada Dies natalis XII cabang salatiga pada tanggal 17 febuari 1963.
23. Hak Jon Lee, *Covenant and Communication: A Christian Moral Conversation With Jurgen Habermas*, (Lanham, Maryland: University Press of America, 2006) , 97-120.
24. O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga: Satya Wacana Press, 2011), 360-361. Di kutip dari dalil-dalil yang disiapkan untuk Seminar Mahasiswa Theologia se Indonesia di Yogya (18-01-1969, namun berhubung terjadi

kesalahpahaman tidak jadi dibawakan.

25. O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab* (Salatiga: Satya Wacana Press, 2011), 126. Memanusiakan Manusia Dalam Orde Baru. Disampaikan pada upacara Dies Natalis X UKSW.
26. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 124. Memanusiakan Manusia Dalam Orde Baru. Disampaikan pada upacara peringatan Dies Natalies X UKSW.
27. O. Notohamidjojo, *Kreatvitas yang Bertanggungjawab*, (Salatiga : Satya wacana Press, 2011), 363. Dikutip dari *Warta Gereja III*. No. 12. Januari-desember, Salatiga, 1968.
28. O. Notohamidjojo, 362.
29. O. Notohamidjojo, 366.
30. Integrito, *Uang Pelicin: Kecil Jumlahnya Besar dampaknya*, (Jakarta: KPK, 2013), 7.

Aktualisasi Visi Teologi Politik Kristen O. Notohamidjojo Bagi Kepemimpinan Bangsa. Suatu Kajian Reflektif terhadap Kekristenan di Indonesia dalam Mewujudkan Negara Pancasila

Kepemimpinan dalam Bingkai Multikulturalisme

Yesaya Sandang

Abstract

A leader in a multicultural society plays a very important role, especially in Indonesian context that already well known for their multicultural society. This article discuss about the ethical principles in the multicultural society and how it related with leadership quality. The aim of this discussion is to show the quality that could work as foundation for every leader in multicultural context. Ultimately this article suggests three qualities; openness and sense of acceptance, communicative, and ethical awerness for justice and solidarity.

Keywords: *Leadership, Multiculturalism, Ethics, Principles*

Pendahuluan

Salah seorang pemimpin bangsa yang memiliki telah terbukti komitmennya terhadap persoalan multikulturalisme adalah (alm) KH Abdurahman Wahid (Gus Dur). Salah satu kebijakannya untuk memberikan pengakuan terhadap kebudayaan Tionghoa di Indonesia mencerminkan hal tersebut. Dalam kaitannya dengan hal itu menarik untuk menyimak tulisan Wildan Pramudya (2010) sesaat setelah Gus Dur wafat. Tulisan itu berjudul "*Gus Dur Sebagai Orang Asing*".

Dalam analisis yang disajikan oleh Pramudya dapat ditemui penjelasan mengapa Gus Dur dapat dikatakan sebagai salah seorang pemimpin dengan wawasan multikultur yang tinggi. Meminjam gagasan sosiolog Georg Simmel Pramudya menjelaskan bahwa Gus Dur mampu menempatkan dirinya dalam suatu 'relasi interseksi yang dibangun atas dasar kedekatan dan keberjarakan' (Pramudya, 2010:6).

Lebih lanjut Pramudya menyatakan bahwa dalam relasi interseksi, orang asing menjadi bagian dari komunitas tetapi tidak sepenuhnya menjadi bagian dari komunitas tersebut karena ia tetap mampu mengambil jarak dengannya. Orang asing adalah orang yang berada di dalam sekaligus di luar komunitas. Gus Dur tepat disebut sebagai orang asing karena selama ini ia mengembangkan relasi interseksi tersebut tidak saja di dalam komunitas NU tetapi juga dengan kekuasaan dan berbagai

komunitas lain yang lebih luas (Pramudya, 2010).

Penempatan diri semacam orang asing inilah yang memungkinkan Gus Dur untuk tetap memiliki pandangan yang cukup arif dalam perspektif kebhinekaan manakala ia harus memutuskan suatu perkara dan mengangkat suara dari kelompok (budaya) yang terpinggirkan. Dengan kata lain, Gus Dur bukan monopoli suatu kultur tertentu, melainkan secara fleksibel mampu menempatkan dirinya dalam berbagai latar kultural. Namun demikian Gus Dur tetap dapat memastikan bahwa dirinya tidak kehilangan identitas bawaannya walau menjadi 'asing' dan dengan demikian ia tetap dapat memahami sudut pandang identitas di luar dirinya ketika harus memimpin dan mengelola berbagai macam pihak dan kepentingan dari beragam latar belakang.

Cerita Gus Dur itu tentunya bukan satu-satunya cerita mengenai pemimpin di Indonesia yang memiliki watak kebhinekaan dan wawasan kebudayaan yang tinggi. Cerita tersebut dijadikan contoh kecil untuk menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia yang demikian majemuk diperlukan sosok pemimpin yang dapat dijadikan rujukan perihal bagaimana mengelola berbagai urusan di bangsa ini ketika kenyataan kemajemukan tidak terelakan.

Seputar Multikulturalisme

Banyak negara saat ini yang secara budaya amat beragam. Menurut perkiraan terakhir, 184 negara merdeka di dunia ini terdiri dari 600 kelompok bahasa hidup dan 5000 kelompok etnis. Hanya di beberapa negara dapat dikatakan bahwa warganya memiliki bahasa yang sama atau termasuk dalam kelompok etnonasional yang serupa (Kymlicka, 2002:1). Sebagaimana diungkapkan oleh Kymlicka (2002:13), masyarakat modern dewasa ini semakin sering diperhadapkan pada berbagai macam kelompok yang menuntut pengakuan atas identitasnya, dan diterimanya perbedaan kulturalnya masing-masing. Hal ini biasa disebut sebagai tantangan multikulturalisme.

Istilah multikulturalisme sendiri sebenarnya mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangannya sendiri-sendiri (Kymlicka, 2002:13). Keterangan ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan multikultur merupakan salah satu bentuk dari pada pluralisme, dalam hal ini pluralisme kultural. Dengan demikian menerima ke-multikultural-an juga berarti menerima ke-plural-an.

Namun dalam perkembangannya pemahaman terhadap

multikulturalisme sering disalahkaprahkan. Paling tidak terdapat dua pemahan ekstrim tentangnya. Pertama, multikulturalisme sering diasosiasikan dengan pemujaan atas perbedaan, yang mengarah kepada gagasan esensialis bahwa setiap identitas budaya memiliki suatu otentisitas dan mereka yang bukan bagian dari identitas ini adalah “orang luar” yang tidak memiliki hak bicara. Kedua, pada ekstrem lainnya multikulturalisme dijadikan kebijakan Negara yang berpretensi memberikan pengakuan terhadap kelompok minoritas. Namun bahayanya karena pengakuan tersebut “diberikan” maka terdapat kemungkinan untuk dicabut kembali (Budiman, 2007:105).

Kesalahkaprahan tersebut berujung pada kritik terhadap multikulturalisme dari beberapa dasar: 1. Teknik manajerial yang dipakai pemerintah, atau pemegang kekuasaan, untuk memperdalam kohesi sosial dengan mengorbankan komunitas minoritas. 2. Asumsi-asumsi bahwa subyek bersifat statis dan “sudah dari sananya”, yang umumnya didefinisikan secara kultural, linguistik, atau perbedaan etik. 3. Komodifikasi perbedaan yang hanya sekedar properti, dan bukan proses-proses dan praktek-prakteknya. 4. Penguatan gagasan atau kesan bahwa seseorang yang berkuasa secara uniter, yang membatasi orang lain boleh mendapat toleransi (Adhanta, 2007:121). Oleh karenanya multikulturalisme tidak dapat dipisahkan dari pluralisme (kultural). Pluralisme sebagai konsep induk memaknai diversitas dengan lebih baik dibanding multikulturalisme yang cenderung menganggap komunitas kultur tertentu bersifat homogen dan melokalisirnya.

Multikulturalisme dan Pluralisme

Pluralisme atau kemajemukan merupakan sebuah fakta yang tak terelakan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan fakta ini, persoalan mengenai tercapainya suatu masyarakat yang beradab dalam kewargaan yang inklusif (terbuka) merupakan sebuah problem universal. Bagi Indonesia misalnya, persoalan kemajemukan kultural ini merupakan suatu fakta konkrit yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan sejak lama seluruh komponen bangsa selalu diingatkan agar hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, ras dan golongan. *Bhinneka Tunggal Ika* jelas merupakan bentuk pengakuan idealitas multikultur di Indonesia.

Masyarakat Indonesia kerap diajak serta dihimbau untuk mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehidupan bersama ke arah terciptanya persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, sebagaimana termaktub dalam

semboyan Bhineka Tunggal Ika itu. Dengan demikian dalam semboyan itu warga Indonesia selalu diingatkan untuk menghargai dan menghayati perbedaan suku bangsa, agama, ras dan golongan sebagai unsur utama untuk memepersatukan dan bukan dijadikan alasan bagi terjadinya konflik sosial maupun vertikal. Itulah mengapa dalam sosiologi, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme dan pluralisme (Liliweri, 2005).

Dari sini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa multi-kulturalisme merupakan pluralisme budaya. Dengan kata lain pengakuan akan kepluralan merupakan gugus gagasan penting bagi multi-kulturalisme. Lebih jauh, multikulturalisme merupakan perangkat gagasan yang memperjuangkan "*politics of recognition*", yakni, bentuk pengakuan terhadap setiap entitas kultural yang ada, khususnya yang terpinggirkan dan tidak berdaya (Gerung, 2008).

Namun perlu diperhatikan pula dalam kondisi sistem negara hukum yang rapuh serta keterpurukan ekonomis, politik multikulturalisme mudah berkembang menjadi politik aliran yang dengan penuh kebencian meradikalkan dan mendramatisir segala perbedaan kecil, sehingga orang kehilangan perspektif menyeluruh. Apalagi jika politik multikulturalisme tersebut dilepaskan dari gugus gagasan pentingnya, yakni pluralisme.

Pendasaran Etis

Sampai pada titik ini muncul problem lain, yakni pijakan etis dan nilai-nilai macam apa yang pantas diajukan sebagai basis bagi multikulturalisme agar ia tidak terjebak kedalam radikalisme. Berikut beberapa pokok yang dapat dijadikan rujukan refleksi:

Pertama, Penerimaan (*Acceptance*). Banyak konflik dan kekejaman di dunia ini dipupuk melalui ilusi tentang adanya sebuah identitas yang tunggal dan tanpa pilihan, dengan kata lain tidak adanya penerimaan terhadap yang lain. Prospek perdamaian dalam dunia masa kini bisa jadi terletak dalam pengakuan akan kemajemukan setiap insan dan pemahaman diri sebagai penghuni bersama dunia yang luas ini (Sen, 2006).

Oleh karena itu, langkah awal yang perlu ditempuh adalah menerima fakta bahwa dalam kehidupan ini terdapat keragaman. Menerima dan merenguh dengan sepenuhnya bahwa ada liyan (*the others*) dalam keseharian, dimana masing-masing mereka memiliki identitas yang tidak sama. Harapan akan terwujudnya harmoni amat bergantung pada

pemahaman yang lebih jernih terhadap kemajemukan identitas manusia, dan pada sikap menerima bahwa identitas-identitas tersebut dapat saling bersinggungan satu sama lain (Sen, 2006).

Kedua, Nalar Komunikatif. Dalam suatu masyarakat plural dan multikultur, komunikasi memainkan peranan yang penting. Komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan yang ada, komunikasi yang bersifat dialogis (dua arah) dan bukan monologis (satu arah). Dalam komunikasi, bukannya masing-masing pihak/partisipan memakai pihak lain untuk mencapai tujuan mereka masing-masing, melainkan masing-masing pihak mengkoordinasikan rencana tindakan mereka. Artinya, masing-masing pihak mengambil alih peran pihak yang lainnya (Suseno, 2000:220).

Suatu komunikasi itu rasional apabila saling pengertian tercapai. Itulah Nalar/Rasionalitas Komunikatif. Demi tercapai saling pengertian diperlukan paling tidak empat unsur dalam suatu komunikasi. Pertama, *kejelasan* : aku mengungkapkan diri dengan jelas sehingga apa yang mau dikatakan dapat dimengerti. Kedua, *kebenaran*: aku mau menyampaikan sesuatu. Ketiga, *kejujuran*: aku mau mengungkapkan diriku. Keempat, *ketepatan*: omonganku harus cocok dengan norma-norma komunikasi, setiap pihak harus mau mencapai saling pengertian. Komunikasi yang berhasil mengandaikan keempat unsur tersebut dan itu semua tidak dapat dipaksakan ataupun direkayasa (Habermas, 1971 dalam Suseno, 2000:221).

Ketiga, Keadilan dan Solidaritas. Masyarakat yang pluralistik hanya dapat ditata secara etis apabila keadilan dinomorsatukan terhadap pandangan-pandangan tentang tujuan hidup manusia. Prinsip-prinsip keadilan harus netral terhadap keyakinan-keyakinan tentang hidup yang baik dalam arti bahwa (a). orang/kelompok orang tidak ada yang didiskriminasikan hanya karena kekhasan keyakinan dan cita-cita moral dan religiusnya; dan (b). bahwa prinsip-prinsip itu oleh seluruh masyarakat dapat diterima sebagai adil, jadi tidak hanya berdasarkan pandangan komunitas tertentu tentang apa yang baik (Suseno 2005:216). Disini keadilan menjadi tanda solidaritas dan hormat anggota masyarakat satu dengan yang lain. Solidaritas diciptakan dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap liyan (*the others*). Kepekaan yang lebih tinggi berarti menjadi lebih sulit bagi kita untuk mendiskriminasi dan memarginalkan orang-orang yang berpikir berbeda dari kita (Rorty, 1989 dalam Suseno, 2000:253).

Problematika Budaya Bangsa

Demikian telah diuraikan berurut-turut sekelumit tentang multikulturalitas beserta gugus gagasan filosofis serta pijakan etisnya. Namun kini tantangan yang harus dilalui ada pada problematika budaya bangsa. Terdengar terlalu pesimis untuk mengatakan situasi kebudayaan di Indonesia kini ada pada kategori katastrofi kebudayaan. Namun, perlu dicermati beberapa gejala yang mengarah pada dugaan semacam itu dalam kompleks peristiwa yang makin menguatirkan. Kecamuk politik amok di masyarakat, pendangkalan intelegensi dalam produk-produk kebudayaan massa, mutu perdebatan akademis yang rendah, selebritisasi jabatan-jabatan publik, pudarnya toleransi sosial horisontal, dendam politik masa lalu dan berbagai rentetan paradoks kemanusiaan (Gerung, 2008). Ini semua merupakan tantangan kebudayaan yang harus dicarikan solusinya.

Kebudayaan dalam pemaknaan apapun mengarahkan kepada pembentukan karakter suatu bangsa. Dengan demikian selalu ada segi politik, kolektif dan historis di dalam kebudayaan. Di sini tepat memang kalau kita berbicara mengenai strategi kebudayaan dalam mengembangkan peradaban bangsa yang multikultur. Namun soalnya, selepas dari rezim orde baru dan memasuki era reformasi hingga saat ini kita terus menerus diperhadapkan pada strategi kebudayaan yang serba tanggung.

Pancasila yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat plural dan semangat pluralisme justru kemudian menjadi salah satu “kebudayaan” yang dianggap bersaing dengan budaya-budaya lainnya. Padahal Pancasila dilahirkan dalam kondisi pluralisme dari segi kenyataan alamiah bangsa Indonesia. Disebut dari kenyataan alamiah karena memang demikian kondisi keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang ada. Dan, ketika Pancasila lahir dan kemudian menjadi dasar negara, bangsa kita memiliki warna plural yang kuat (Nasution & Agustinus, 2006).

Untuk menyikapi problematika kebudayaan yang sementara menyeruak rupa-rupanya dibutuhkan pula politik kebudayaan dan pendidikan kewargaan yang berwawasan multikultur. Politik kebudayaan dibutuhkan demi menjawab kebutuhan mengenai arah dan cita-cita Indonesia sebagai suatu komunitas politik yang masih perlu dipertahankan. Apa yang mau dilakukan terhadap manusianya, cita-citanya, dan tujuan-tujuan dasarnya? Di sisi yang lain pendidikan sangat erat dengan kebudayaan, sebab menjadi manusia sebagai inti pendidikan berarti membentuk lingkungan hidupnya, yang tidak lain adalah kebudayaannya.

Kalau globalisasi memiliki kecenderungan homogenisasi budaya, yakni menyeragamkan budaya dalam kemasan yang sama. Maka multikulturalisme merupakan reaksi terhadapnya, multikulturalisme boleh jadi menekankan toleransi yang terbuka terhadap masuknya berbagai budaya asing, tetapi dari lain pihak bisa juga menandai munculnya kesadaran dan kebangkitan budaya-budaya tradisional untuk menyatakan identitas mereka (Gerung, 2005).

Kepemimpinan Berwawasan Multikultur

Sekarang beralih kepada pembahasan mengenai kepemimpinan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemimpin dalam konteks pembahasan ini adalah pemimpin yang mampu menegakkan suatu peradaban multikultur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini pemimpin memiliki peranan krusial demi tercipta kepastian hidup bersama dalam bingkai kemajemukan. Tentunya ini bukan barang gampang walau tetap dimungkinkan. Sejarah peradaban dunia dan juga Indonesia dipenuhi oleh kisah-kisah para pemimpin yang menaruh komitmen besar terhadap kemajemukan, dimana cerita Gus Dur yang diangkat pada sebagai pembuka pembahasan ini adalah salah satunya.

Berangkat dari refleksi terhadap pijakan etis dan nilai-nilai macam apa yang dapat diajukan sebagai basis bagi multikulturalisme, berikut dielaborasi ke dalam kualitas-kualitas pemimpin berwawasan multikultur. **Pertama**, keterbukaan. Menjadi pemimpin yang berwawasan multikultur tentunya memerlukan pertama-tama sikap yang mau terbuka terhadap berbagai macam keragaman yang ada diluar dirinya. Setiap pemimpin model ini memiliki '*sense of acceptance*' yang tinggi terhadap berbagai macam latar budaya yang tidak ia miliki.

Keterbukaan juga berarti interaksi dan interseksi yang luas sehingga dengan demikian pemimpin model ini memiliki tingkat pergaulan yang luas. Interaksi yang ia miliki tidak semata-mata terbatas pada kalangan/kelompoknya. Bahkan lebih daripada itu ia juga sanggup memiliki keterlibatan yang mendalam terhadap berbagai kalangan di luar kelompoknya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan kualitas ini di iringi dengan kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang dekat sekaligus berjarak. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga objektivitas karena dengan begitulah dukungan terhadap multikulturalitas menjadi berimbang dan proporsional.

Kedua, komunikatif. Pemimpin yang ingin memastikan keberlangsungan multikulturalitas dengan baik perlu mengembangkan

kemampuan berkomunikasi lintas kultur yang baik pula demi terciptanya iklim yang kondusif bagi kemajemukan. Di sini poin pentingnya adalah membangun komunikasi yang berpedoman pada nalar komunikatif sehingga tidak ada satu kelompokpun yang merasa terabaikan dan dimanipulasi. Komunikasi semacam ini mensyaratkan sang pemimpin untuk aktif melakukan pendekatan komunikasi dan menciptakan ruang-ruang dialog.

Ketiga, memiliki kesadaran etis. Setiap pemimpin yang berwawasan multikultur perlu memiliki wawasan dan mengupayakan keadilan serta solidaritas. Karena akan menjadi sia-sia keterbukaan, interaksi/interseksi dan kemampuan membangun komunikasi yang baik tanpa diakhiri dengan perwujudan nyata ke dalam keadilan dan solidaritas sosial. Kenyataan multikultur hanya dapat dipastikan keberlangsungannya jika dalam realita sosial, masing-masing kultur menikmati keadilan. Oleh karena itu, pemimpin juga perlu turut berperan untuk menciptakan terwujudnya keadilan dan solidaritas sosial. Dengan cara ini pula kohesivitas sosial sekaligus dapat dipastikan terwujud.

Penutup

Pasca pergantian kepemimpinan nasional 2014 (baca: Pilpres) lalu wajar kiranya jika diiringi dengan harapan bahwa pemimpin bangsa yang terpilih mampu memimpin bangsa ini untuk semakin dewasa dalam urusan multikulturalisme dan dapat menjawab tantangan kebudayaan yang menghadang. Seorang pemimpin yang dapat berperan aktif demi menjaga keutuhan Republik Indonesia dan juga mampu untuk menopang tegaknya peradaban yang lebih berperikemanusiaan, adil, dan beradab.

Harapan juga digantungkan agar sebagai pemimpin bangsa, komitmen dirinya terhadap multikulturalisme di Indonesia dapat dijadikan sebagai rujukan dan teladan bagi segenap komponen bangsa. Hal ini penting agar dengan demikian dapat memicu preseden-preseden baru dalam sejarah bangsa dan menghasilkan efek yang lebih luas dan permanen. Memang disadari bahwa ada beberapa persoalan bangsa lainnya yang perlu dipecahkan secepatnya, misalnya urusan ekonomi dan politik, sehingga masalah kebudayaan dan multikulturalisme bisa saja belum akan segera muncul kepermukaan (jika tidak ada kasus 'besar' yang mendesak). Untuk itu perlu tetap dipastikan bahwasannya problem kebudayaan dan multikulturalisme tetap ada dalam agenda kepemimpinan nasional.